

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura yang memiliki luas wilayah 2.093,47 km<sup>2</sup> yang didiami oleh 1.042.312 jiwa. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumenep diperintah oleh Adipati ( *Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal Madura* ) dibawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumenep adalah Arya Wiraraja, beliau memerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kertanegara Raja Singhasari. Pemerintahan kerajaan di Sumenep berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumenep akibat dampak dihapuskannya sistem keswaprajaan di Sumenep oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah kabupaten Sumenep dibawah pemerintahan langsung *Nederland Indische Regening*, sehingga Sumenep lebih dikenal dengan sebutan *regent*. Namun Perlu diketahui, dari tahun 1883 - 1929 para Bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tetap dari keturunan bangsawan dalem Keraton Sumenep.

#### **4.1.1 Visi Kabupaten Sumenep**

Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2011-2015 memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi SUPER MANTAP (Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional).

#### **4.1.2 Misi Kabupaten Sumenep**

Dalam rangka mewujudkan visi dari pemerintah Kabupaten Sumenep, maka, dijabarkan misi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2011 – 2015 yaitu, Kabupaten Sumenep menetapkan prioritas sebagai berikut:

- Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industry kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional;
- Mengembangkan pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan;
- Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan;
- Menyempurnakan dan mengembangkan system pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-

nilai agama dan budaya yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional;

- Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta pemukiman;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang professional dan konsistensi dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.

#### **4.1.3 Demografi**

##### **a. Kependudukan**

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2013, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.042.312 jiwa, yang terdiri atas 495.896 jiwa laki-laki dan 546.416 jiwa perempuan. Dari hasil SP 2013 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan**  
**Usia dan Jenis Kelamin**

No.	Rentang Usia (tahun)	Penduduk		Sumber	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-14	148.769	163.925	BPS	Usia produktif adalah usia antara 15-55 tahun dimana penduduk dimungkinkan untuk bekerja dengan baik.
2	15-55	272.743	300.529	BPS	
3	56 +	74.384	81.962	BPS	
<b>Sub Total</b>		<b>495.896</b>	<b>546.416</b>		
				<b>1.042.312</b>	
<b>Sex Ratio (laki-laki/perempuan) x 100</b>				<b>90,75429709</b>	Perempuan > Laki
<b>Rasio Tingkat Kerentanan Penduduk (usia produktif/non produktif) x 100</b>				<b>81,81805495</b>	Kerentanan rendah

Sumber: Buku Sumenep Dalam Angka, tahun 2013

Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk terdapat 91 sampai 92 orang laki-laki, yang artinya pertumbuhan penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Sedangkan Rasio Kerentanan Penduduk sebesar 81,81 artinya setiap 100 penduduk bekerja menanggung 81 sampai 82 orang yang tidak bekerja, sehingga Sumenep memiliki rasio kerentanan yang rendah.

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km<sup>2</sup> yang didiami oleh 1.042.312 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km<sup>2</sup>, dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan batuan yakni 446 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sex ratio penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan SP 2013 adalah sebesar 90,75 yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 9,36 % lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2004-2013 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah kecamatan Talango sebesar -0,36%.

Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil SP 2013 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP 2010 rata-rata sebanyak 3,30 orang. Rata-rata anggota RT di setiap kecamatan berkisar antara 2,48 orang-3,86 orang

#### **b. Agama**

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2013, penganut Islam berjumlah 1.033.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%).

#### **a. Bahasa**

Bahasa yang digunakan di Kabupaten Sumenep adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu

beberapa daerah di Pulau Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa bajo, bahasa Mandar, bahasa Makasar dan beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Untuk Pulau Kangean bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura dialek Kangean.

## b. Kecamatan

Kabupaten Sumenep memiliki 26 Kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Kecamatan**  
**Kabupaten Sumenep**

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Kecamatan Ambunten	14	Kecamatan Kangean
2	Kecamatan Arjasa	15	Kecamatan Kota
3	Kecamatan Batang-batang	16	Kecamatan Lenteng
4	Kecamatan Batuan	17	Kecamatan Manding
5	Kecamatan Batuputih	18	Kecamatan Masalembu
6	Kecamatan Bluto	19	Kecamatan Nonggunong
7	Kecamatan Dasuk	20	Kecamatan Pasongsongan
8	Kecamatan Dungkek	21	Kecamatan Pragaan
9	Kecamatan Ganding	22	Kecamatan Rubaru
9	Kecamatan Gapura	23	Kecamatan Sapeken
11	Kecamatan Giligenting	24	Kecamatan Saronggi
12	Kecamatan Guluk-guluk	25	Kecamatan Talango
13	Kecamatan Kalianget	26	Kecamatan Raas

Sumber: Kantor Bapedda Kabupaten Sumenep, tahun 2014

## 4.2 Deskripsi Objek Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini, ada dua cara dalam proses pengumpulan kuesioner, yaitu peneliti menunggu di tempat responden pada saat pengisian kuesioner dan

beberapa responden meminta sesuai waktu yang ditentukan kuesioner dijemput kembali. Dari 38 kuesioner yang disebar/dibagikan yang kembali sebanyak 34 kuesioner. Tidak ada kuesioner yang cacat/rusak, sehingga seluruh kuesioner yang kembali bisa digunakan untuk melakukan analisis data, yaitu sebanyak 34 kuesioner. Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian yang secara langsung bekerja di instansi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, dan pengambilan sampel menggunakan Metode sensus yaitu merupakan metode yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik (Usman & Akbar, 2008). Berdasarkan pemilihan sampel tersebut diketahui (lihat tabel 4.3) ada 34 pegawai yang mewakili sebagai sampel dalam proses penganalisisan.

**Tabel 4.3**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kuesioner yang disebar	38
2	Kuesioner yang kembali	34
3	Kuesioner yang tidak kembali	4
4	Kuesioner yang bisa di analisa	34

Sumber: SKPD (data diolah tahun 2014)

Kabupaten Sumenep memiliki 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sumenep**

No	Instansi / Unit Kerja
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	BKPP
3	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Lingkungan Hidup
7	Badan Kesbang, Politik dan Limas
8	Inspektur Kabupaten
9	Sekretaris DPRD
10	Dinas Pendidikan
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Sosial
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
16	Dinas PU. Marga
17	Dinas PU. Pengairan
18	Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang
19	Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
20	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah
21	Dinas Perindustrian dan perdagangan
22	Dinas Kependudukan dan capil
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Dinas Kelautan dan Perikanan
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
26	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
27	Kadis Peternakan
28	Kantor Kebersihan dan Pertanian
29	Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi
30	Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral
31	Kasatpol PP
32	Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep

Sumber: Kantor Bapedda Kabupaten Sumenep



**Lanjutan Tabel 4.4**  
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sumenep**

No	Instansi / Unit Kerja
33	Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
34	RSUD Dr. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep
35	Kantor Wirausaha Sumekar
36	PT. BPRS Bhakti Sumekar
37	PT. Sumekar
38	PDAM

Sumber: Kantor Bapedda Kabupaten Sumenep

Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

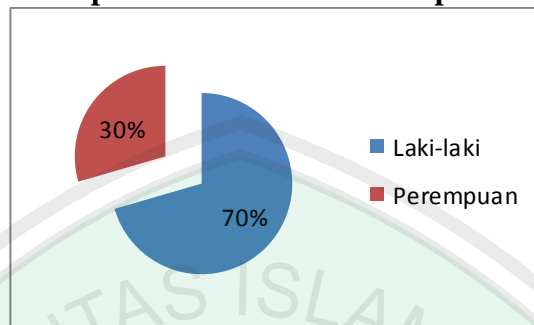
#### 4.2.1.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.5**  
**Komposisi Jenis Kelamin Responden**

No	Responden	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	24	70,5%
2	Prempuan	10	29,5%
<b>Total</b>		34	100%

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.1**  
**Komposisi Jenis Kelamin Responden**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 24 orang atau sekitar 70,5% lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan yang hanya berjumlah 10 orang atau sekitar 29,5%.

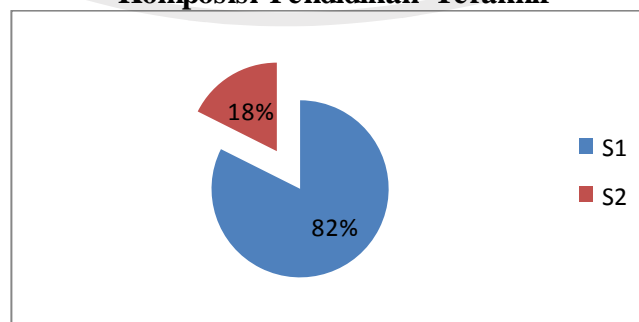
#### 4.2.1.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.6**  
**Pendidikan Terakhir Responden**

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	S1	28	82,4%
2	S2	6	17,6%
<b>Total</b>		34	100%

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.2**  
**Komposisi Pendidikan Terakhir**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pendidikan responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner secara langsung lebih banyak bergelar Sarjana (S1) yaitu sekitar 28 responden daripada yang bergelar Sarjana (S2) yaitu hanya 6 reponden.

### **4.3 Analisis Data**

#### **4.3.1 Persiapan Data**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan dan *good governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian yakni kepala bagian SKPD yang ada di Kabupaten Sumenep. Perolehan data yakni dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 38 SKPD yang ada di Kabupaten Sumenep, proses pengumpulan data dilakukan selama 3 minggu.

Adapun data yang diperoleh yakni kuesioner berupa pernyataan mengenai sistem pelaporan dan *good governance*. Dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel *good governance* yaitu berupa Akuntabilitas, transparansi, kapasitas, responsivitas dan keadilan/kesetaraan. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diolah dengan bantuan *SPSS (Statistical Package for Social Science) 16.0 for windows*.

#### **4.3.2 Statistik Deskriptif**

Deskripsi statistik dari variabel terikat yakni akuntabilitas laporan keuangan (y), dan keseluruhan variabel bebas yakni sistem pelaporan (x1), dan *good governance* (x2), akan diketahui melalui nilai frekuensi dari masing-masing variabel dan akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

## 1. Akuntabilitas Laporan Keuangan

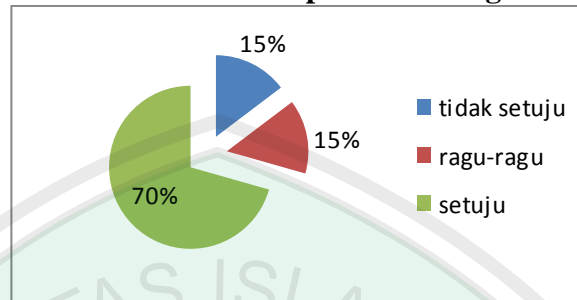
Statistik deskriptif dari variable terikat (Y) yakni akuntabilitas laporan keuangan memiliki 13 item pertanyaan dan nilai frekuensinya sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Akuntabilitas Laporan Keuangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	2.9	2.9	2.9
	tidak setuju	1	2.9	2.9	5.9
	tidak setuju	2	5.9	5.9	11.8
	tidak setuju	1	2.9	2.9	14.7
	ragu-ragu	2	5.9	5.9	20.6
	ragu-ragu	1	2.9	2.9	23.5
	ragu-ragu	1	2.9	2.9	26.5
	ragu-ragu	1	2.9	2.9	29.4
	Setuju	1	2.9	2.9	32.4
	Setuju	2	5.9	5.9	38.2
	Setuju	7	20.6	20.6	58.8
	Setuju	10	29.4	29.4	88.2
	Setuju	1	2.9	2.9	91.2
	Setuju	2	5.9	5.9	97.1
	Setuju	1	2.9	2.9	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.3**  
**Akuntabilitas Laporan Keuangan**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan sebagai variabel independen dengan prosentase sebesar 15% tidak setuju dan 15% ragu-ragu sisanya sebanyak 70% yang setuju, hal ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep memiliki pertanggungjawaban yang tinggi.

## 2. Sistem Pelaporan

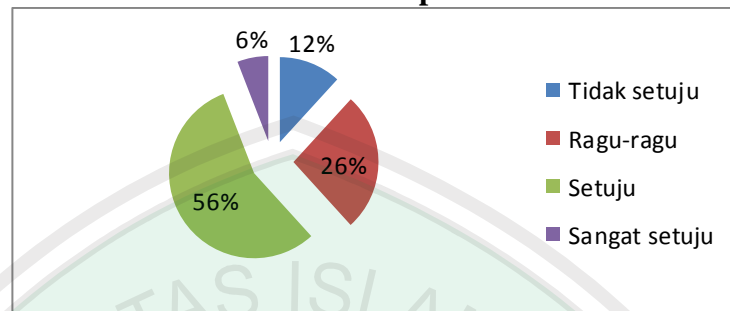
Statistik deskriptif dari variable bebas (X1) yakni sistem pelaporan memiliki 2 item pertanyaan dan nilai frekuensinya sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Sistem Pelaporan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	4	11.8	11.8	11.8
Ragu-ragu	9	26.5	26.5	38.2
Setuju	19	55.9	55.9	94.1
Sangat Setuju	2	5.9	5.9	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.4**  
**Sistem Pelaporan**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.8 dan digambarkan pada grafik 4.3 bahwa untuk sistem pelaporan sebagai variable (x1) memiliki prosentase 12% tidak setuju, 26% ragu-ragu, 56% setuju dan 6% sangat setuju. Maka tata cara dan ketepatan waktu pelaporan yang digunakan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah RI no 56 tahun 2001.

### 3. *Good Governance*

Statistik deskriptif dari variable bebas (X2) yakni *good governance* memiliki 13 item pertanyaan yang dibagi dalam 5 kelompok yaitu akuntabilitas, transparansi, kapasitas, responsivitas dan yang terakhir keadilan/kesetaraan. Memiliki nilai frekuensi sebagai berikut:

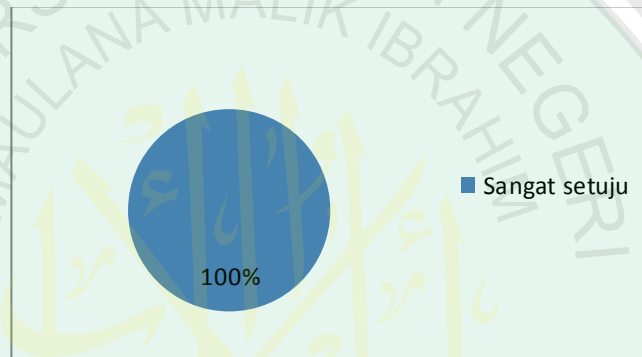
**a. Akuntabilitas**

**Tabel 4.9**  
**Akuntabilitas**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangatsetuju	34	100.0	100.0	100.0

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.5**  
**Akuntabilitas**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.9 dan digambarkan pada grafik 4.4 bahwa akuntabilitas sebagai salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* variable (x2) memiliki prosentase 100% sangat setuju. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi dalam menjalani tugas, fungsi dan wewenang sebagai pegawai di Kabupaten Sumenep dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran.

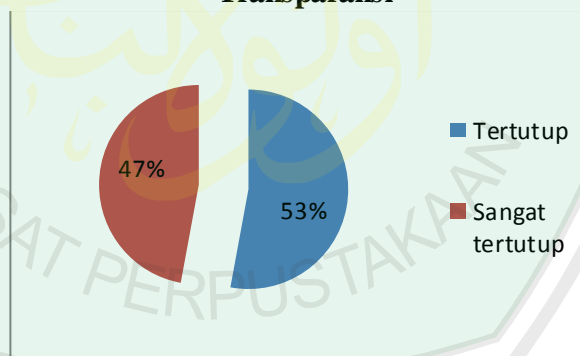
## b. Transparansi

**Tabel 4.10**  
**Transparansi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tertutup	2	5.9	5.9	5.9
tertutup	7	20.6	20.6	26.5
tertutup	9	26.5	26.5	52.9
sangat tertutup	13	38.2	38.2	91.2
sangat tertutup	3	8.8	8.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.6**  
**Transparansi**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.10 dan digambarkan pada grafik 4.5 bahwa transparansi sebagai salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* variable (x2) memiliki prosentase 47% tertutup dan 53% sangat tertutup. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep tertutup dalam



komunikasi dengan masyarakat dan aliran penggunaan dana dari kas instansi tidak disampaikan secara terbuka.

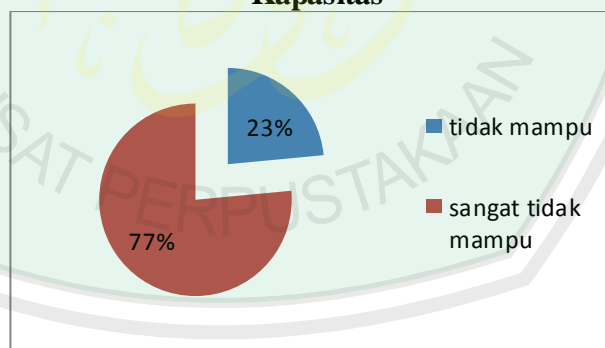
### c. Kapasitas

**Tabel 4.11**  
**Kapasitas**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak mampu	3	8.8	8.8	8.8
tidak mampu	4	11.8	11.8	20.6
tidak mampu	1	2.9	2.9	23.5
sangat tidak mampu	26	76.5	76.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.7**  
**Kapasitas**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.11 dan digambarkan pada grafik 4.6 bahwa kapasitas sebagai salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* variable (x2) memiliki prosentase 23% tidak mampu dan 77% sangat tidak mampu.

Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki pegawai yang kurang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan perlu mendapatkan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

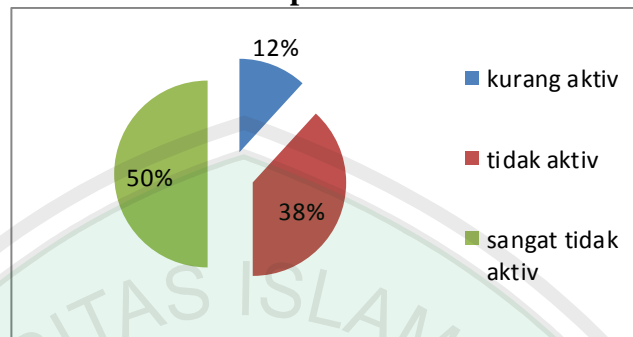
#### d. Responsivitas

**Tabel 4.12**  
**Responsivitas**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang aktif	2	5.9	5.9	5.9
kurang aktif	1	2.9	2.9	8.8
kurang aktif	1	2.9	2.9	11.8
tidak aktif	6	17.6	17.6	29.4
tidak aktif	2	5.9	5.9	35.3
tidak aktif	5	14.7	14.7	50.0
sangat tidak aktif	12	35.3	35.3	85.3
sangat tidak aktif	5	14.7	14.7	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.8**  
**Responsivitas**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.12 dan digambarkan pada grafik 4.7 bahwa responsivitas sebagai salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* variable (x2) memiliki prosentase 12% kurang aktif, 38% tidak aktif dan 50% sangat tidak aktif. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep kurang aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan kurang menanggapi aspirasi warga untuk didengar dan ditindak lanjuti.

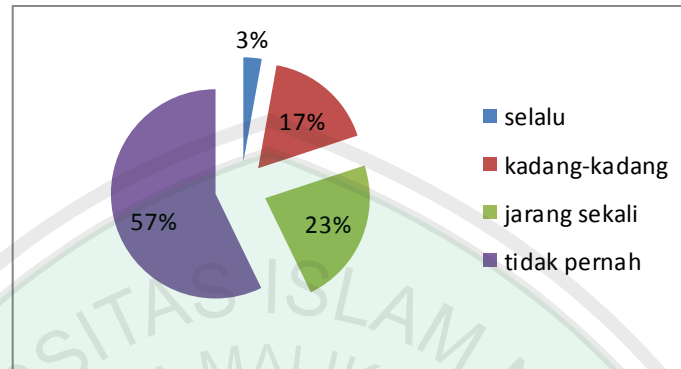
**e. Keadilan/kesetaraan**

**Tabel 4.13**  
**Keadilan/Kesetaraan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid selalu	1	2.9	2.9	2.9
kadang-kadang	5	14.7	14.7	17.6
jarang sekali	1	2.9	2.9	20.6
jarang sekali	7	20.6	20.6	41.2
tidak pernah	20	58.8	58.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

**Grafik 4.9**  
**Keadilan/Kesetaraan**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.13 dan digambarkan pada grafik 4.8 bahwa keadilan/kesetaraan sebagai salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* variable (x2) memiliki prosentase 57% tidak pernah, 23% jarang sekali, 17% kadang-kadang dan 3% selalu. Hal ini menyatakan bahwa di instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep pegawai diperlakukan tidak adil dan membedakan jenis kelamin dalam penempatan posisi.

#### 4.3.3 Uji Validitas

Uji validitas merupakan konsep pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Nazaruddin, 2007). Uji validitas dilakukan dengan uji homogenitas data yaitu dengan melakukan uji korelasi antara skor item-item pernyataan dengan skor total (*pearson corelation*). Sarat uji validitas yaitu masing-masing item harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikan 5%. Hasil uji validitas secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Uji Validitas**  
**Sistem Pelaporan (X1)**

No item	Pearson correlation ( $r_{hitung}$ )	Status
X1.1	0,970	Valid
X1.2	0,967	Valid

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Berdasarkan hasil uji validitas (tabel 4.14) diatas terlihat bahwa nilai masing-masing pernyataan X1.1 sebesar 0,970, X1.2 sebesar 0,967 sehingga berdasarkan hasil uji validitas dengan analisis faktor adalah valid sebagai pembentuk variabel sistem pelaporan dikarenakan hasilnya lebih dari 0,5.

**Tabel 4.15**  
**Uji Validitas**  
**Good Governance (X2)**

No Item	Pearson correlation ( $r_{hitung}$ )	Status
X2.1	0,810	Valid
X2.2	0,805	Valid
X2.3	0,437	Valid
X2.4	0,677	Valid
X2.5	0,545	Valid
X2.6	0,696	Valid
X2.7	0,596	Valid
X2.8	0,541	Valid
X2.9	0,483	Valid
X2.10	0,561	Valid
X2.11	0,637	Valid
X2.12	0,702	Valid
X2.13	0,566	Valid

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Berdasarkan hasil uji validitas (tabel 4.15) diatas terlihat bahwa nilai masing-masing pernyataan X2.1 sebesar 0,810, X2.2 sebesar 0,805, X2.3 sebesar 0,437, X2.4 sebesar 0,677, X2.5 sebesar 0,545, X2.6 sebesar 0,696, X2.7 sebesar 0,596, X2.8 sebesar 0,541, X2.9 sebesar 0,483, X2.10 sebesar 0,561, X2.11 sebesar 0,637, X2.12 sebesar 0,702, X2.13 sebesar 0,566 sehingga berdasarkan hasil uji validitas dengan analisis faktor adalah valid sebagai pembentuk variabel *good governance* dikarenakan hasilnya lebih dari 0,5.

**Tabel 4.16**  
**Uji Validitas**  
**Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y)**

No Item	Pearson correlation (r hitung)	Status
Y.1	0,709	Valid
Y.2	0,906	Valid
Y.3	0,964	Valid
Y.4	0,970	Valid
Y.5	0,965	Valid
Y.6	0,889	Valid
Y.7	0,934	Valid
Y.8	0,938	Valid
Y.9	0,863	Valid
Y.10	0,952	Valid
Y.11	0,952	Valid
Y.12	0,895	Valid
Y.13	0,892	Valid

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Berdasarkan hasil uji validitas (tabel 4.16) diatas terlihat bahwa nilai masing-masing pernyataan Y.1 sebesar 0,709, Y.2 sebesar 0,906, Y.3 sebesar 0,964, Y.4 sebesar 0,970, Y.5 sebesar 0,965, Y.6 sebesar 0,889, Y.7 sebesar 0,934, Y.8 sebesar 0,938, Y.9 sebesar 0,863, Y.10 sebesar 0,952, Y.11 sebesar 0,952, Y.12 sebesar 0,895, Y.13 sebesar 0,892 sehingga berdasarkan hasil uji validitas dengan analisis

faktor adalah valid sebagai pembentuk variabel akuntabilitas laporan keuangan dikarenakan hasilnya lebih dari 0,5.

#### 4.3.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan atas instrumen yang telah valid. Metode pengujiannya menggunakan *Cronbach Alpha*. Reliabilitas dalam penelitian ini merupakan derajat ketepatan, ketelitian, atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur. Dengan menggunakan program *SPSS*, hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Uji Reliabilitas**

No	Nama Variabel	Standar <i>Cronbach Alpha</i>	Hasil <i>Cronbach Alpha</i>	Status
1	Sistem pelaporan	0,60	,934	Reliabel
2	<i>Good governance</i>	0,60	,844	Reliabel
3	Akuntabilitas laporan keuangan	0,60	,983	Reliabel

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Berdasarkan (tabel 4.17) dapat dilihat Nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan angka di atas 0,60 Nunnally (1978) dalam Ghozali (2002) sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. *Cronbach Alpha* dari ketiga variabel mempunyai nilai di atas 0,60 sehingga menunjukkan bahwa instrumen pengukuran tersebut memberikan derajat ketepatan dan ketelitian serta dapat diandalkan. Sistem pelaporan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,934, *good governance* memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,844 dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,983.

### 4.3.5 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan metode *kolmogorov-smirnov*. Hasil pengujian normalitas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Uji Normalitas**  
Test of Normality

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		34
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.3986782
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positiv e	.053
	Negative	-.073
Kolmogorov -Smirnov Z		.426
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

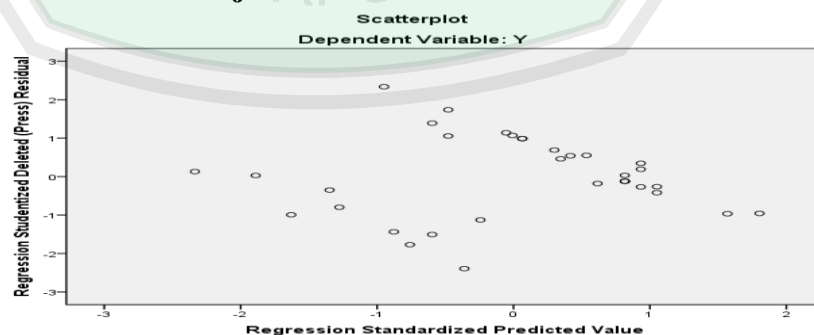


Berdasarkan (tabel 4.18) pada Kolmogorov-Smirnov menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan apabila nilai probabilitas sig (p) > 0,05 maka memiliki distribusi normal, sedangkan apabila nilai probabilitas sig (p) < 0,05 maka memiliki distribusi tidak normal. Dilihat dari hasil diatas dimana nilai sig (p) > 0,05 yaitu pada nilai 0,993 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Karena hasil semua variabel berdistribusi normal maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

#### b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varians yang sama. Pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*, jika grafik yang dihasilkan membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas disajikan dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Uji Heterokedastisitas**



Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Berdasarkan *scatter plot* dapat disimpulkan bahwa untuk variabel dependen akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) tidak terjadi heterokedastisitas yang ditunjukkan pada grafik *scatterplot* bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

#### a. Uji Autokorelasi

Pengujian ini artinya adanya korelasi antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang.

**Tabel 4.19**  
**Uji autokorelasi**  
**Model summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.785 <sup>a</sup>	.616	.592	6.60186	2.418

a. Predictors: (constant), X2, X1

b. Dependent variabel: Y

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Berdasarkan tabel (4.19) bisa dilihat dari besaran Durbin-Watson, bahwa adanya deteksi autokorelasi yaitu pada angka D-W dibawah 2 berarti ada autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, sedangkan angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Pada analisis di atas besarnya angka D-W sebesar 2.418. Karena nilai D-W terletak antara batas bawah dan batas atas ( $-2 < 2.418 < 2$ ) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

### b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Berikut tabel uji Multikolinearitas:

**Tabel 4.20**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.960	1.041
X2	.960	1.041

a. Dependent Variable: Y  
Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dari (tabel 4.20) diatas diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah Multikolinearitas.

### 4.3.5 Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.21**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	$\beta$	t (hitung)	Sig t
<i>Constant</i>	-27,025	-2,614	0.014
<i>Sistem pelaporan (X<sub>1</sub>)</i>	2,574	3,232	0.003
<i>Good governance (X<sub>2</sub>)</i>	0,955	5,505	0.000
<i>F Test</i>	= 24,915		
<i>Sig. F</i>	= 0,000 <sup>a</sup>		
<i>R. Square</i>	= 0,616		
<i>Adj. R</i>	= 0,592		

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Dari (tabel 4.21) diketahui persamaan regresi berganda adalah,

$$Y = -27,025 + 2,574x_1 + 0,955x_2$$

### a. Uji F

**Tabel 4.22**  
**Anova**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2171.819	2	1085.910	24.915	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1351.122	31	43.585		
	Total	3522.941	33			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Pengaruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dapat dilihat dengan membandingkan  $P_{value}$  dengan tingkat signifikansi pada taraf nyata 0,05 (5%), dimana apabila signifikansi  $F < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. dan sebaliknya jika signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Pada (tabel 4.22) dapat diketahui nilai  $F_{test}$  sebesar 24,915 dengan tingkat signifikansi  $F$  sebesar 0,000 dibawah 0,05, maka  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel sistem pelaporan dan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 4.23**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.785 <sup>a</sup>	.616	.592	6.60186	2.418

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: SKPD (data diolah, tahun 2014)

Pada (tabel 4.23) menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,592 dimana bahwa 59,2% perubahan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen yang ada dalam model dan sisanya (100%-59,2%) 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Artinya variabel kinerja manajerial yang terdiri dari sistem pelaporan dan *good governance* berpengaruh sebesar 59,2% terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep. Sedangkan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### c. Uji t

Pada Uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan  $P_{value}$  dengan tingkat signifikansi pada taraf nyata 0,05 (5%), dimana apabila signifikansi  $t < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika signifikansi  $t > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 4.4 Pembahasan

Dari hasil  $t_{uji}$  pada tabel 4.10 diatas diketahui bahwa pengaruh variabel yang terdiri dari sistem pelaporan dan *good governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep

Variabel sistem pelaporan ( $X_1$ ) menunjukkan nilai  $t_{test}$  sebesar 3,232 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,003 dibawah  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep. Artinya apabila sistem pelaporan mengalami kenaikan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep juga mengalami kenaikan dan sebaliknya jika sistem pelaporan mengalami

penurunan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep juga akan mengalami penurunan. Sebagaimana ditunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sistem pelaporan menandakan bahwa kinerja manajerial dalam hal pertanggung jawabannya baik secara horizontal maupun vertikal semakin baik.

Dalam LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) bagian akuntabilitas kinerja terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas Kinerja meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran. Sedangkan analisis keuangan berisi alokasi dan sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi. Keduanya adalah instrumen LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), dan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan jenis-jenis laporan yang terpisah, meskipun diharapkan penyusunannya dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.

Apabila Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan diintegrasikan secara penuh, sebenarnya dalam hal pemeriksaan oleh BPK tidak ada masalah. Hal ini karena berdasarkan UU 15/2004 disebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri

atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Apabila pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah menghasilkan opini, pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Penggabungan tersebut dapat mengambil bentuk suatu laporan terpisah atau suatu laporan lengkap. Dalam hal ini, di Amerika Serikat, berdasarkan Government and Results ACT of 1993 (GPRA) terdapat satu saja Laporan Akuntabilitas, yang mencakup informasi program dan informasi keuangan (termasuk laporan keuangan yang sudah diaudit) serta ukuran-ukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Artely, Ellison, & Kennedy, 2001).

Akan tetapi keputusan Kepala LAN yang diterbitkan tahun 2003 tersebut sampai saat ini belum diganti atau belum ada keputusan yang baru. Seperti yang diuraikan secara singkat di atas, pada keputusan tersebut belum tergambar adanya penggabungan antara laporan kinerja dengan laporan keuangan. Jika dicermati uraian pada akuntabilitas keuangan, ternyata hanya berisi rencana dan realisasi anggaran serta analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penelitian Yahya et al (2007) menunjukkan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kemudian pada peneliti lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja



(Kusumaningrum, 2010), penelitian dari Herawaty (2011) memperlihatkan secara simultan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

## **2. Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep**

Variabel *good governance* ( $X_2$ ) menunjukkan nilai  $t_{test}$  sebesar 5,505 dengan signifikan  $t$  sebesar 0,000 dibawah  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel *good governance* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep. Artinya apabila *good governance* mengalami kenaikan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep juga mengalami kenaikan dan sebaliknya jika *good governance* mengalami penurunan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumenep juga akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvira (2011) menunjukkan bahwa *Good Governance* mempunyai hubungan yang erat (kuat) dengan akuntabilitas keuangan. Sebagaimana ditunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *good governance* menandakan bahwa kinerja manajerial dalam hal pertanggung jawabannya baik secara horizontal maupun vertikal semakin baik.